

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022

Jalan Raya Tlanakan

Pamekasan - Jawa Timur 69371

Telp. 0324322458 Fax. 0324327428

e-mail : pa_pm126@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Tlanakan

Telp. 0324322458 Fax. 0324327428

Pamekasan - Jawa Timur 69371

e-mail : pa_pmk126@yahoo.com

KATA PENGANTAR

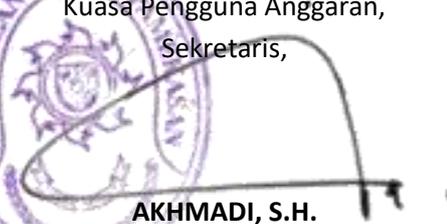
Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Pamekasan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pamekasan, 30 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

AKHMADI, S.H.
NIP.197006091991031001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: ...	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
Daftar dan Lampiran	57
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	58
Daftar Hibah Langsung.....	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Pamekasan

Jalan Raya Tlanakan Pamekasan - Jawa Timur 69371

Telp. 0324322458 Fax. 0324327428 e-mail : pa_pmk126@yahoo.com

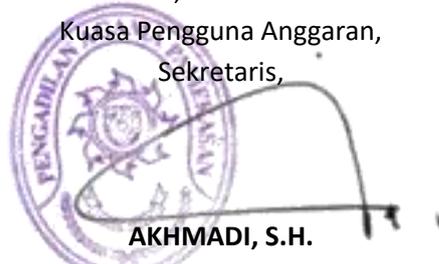
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pamekasan, 30 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



AKHMADI, S.H.

NIP.197006091991031001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.808.211.746 atau mencapai 98,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.894.513.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.737.582.500 ; yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 103.800; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 5.737.478.700; Kewajiban Jangka Pendek (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.19.987.114; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 19.987.114 dan Rp. 5.717.595.386 jadi jumlahnya sebesar Rp. 5.737.582.500

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban

adalah sebesar Rp. 5.036.808.493 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.036.808.493) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (5.036.808.493)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 5.556.327.383 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(5.036.808.493) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.198.076.496 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 5.717.595.386

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0,00	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.297.450.000	3.228.287.868	98,00	3.160.808.305
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.573.563.000	1.556.423.878	99,00	1.343.506.787
3.	Belanja Modal	B.2.3.	23.500.000	23.500.000	100,00	37.500.000
	Jumlah Belanja Negara		4.894.513.000	4.808.211.746	98,00	4.541.815.092

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (Preparid)	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	103.800	510.450
Jumlah Aset Lancar		103.800	510.450
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	2.447.769.000	2.447.769.000
Peralatan dan Mesin	C. 5.	2.270.643.734	1.857.278.984
Gedung dan Bangunan	C. 6.	3.595.930.000	3.595.930.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	5.704.857	5.704.857
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	(2.582.568.891)	(2.332.604.165)
Jumlah Aset Tetap		5.737.478.700	5.574.078.676
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 11.	22.200.000	22.200.000
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	C. 12.	(22.200.000)	(22.200.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		5.737.582.500	5.574.589.126
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 13.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.987.114	18.261.743
Jumlah Kewajiban		19.987.114	18.261.743
EKUITAS			
Ekuitas	C. 14.	5.717.595.386	5.556.327.383
Jumlah Ekuitas Dana		5.717.595.386	5.556.327.383
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		5.737.582.500	5.574.589.126

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	360.000
Jumlah Pendapatan		0	360.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.228.287.868	3.157.076.305
Beban Persediaan	D. 3	38.379.850	44.420.650
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.092.640.549	941.959.204
Beban Pemeliharaan	D. 5	372.604.500	311.101.335
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	46.650.000	47.583.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	249.964.726	225.954.761
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		5.036.808.493	4.728.095.255
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.036.808.493)	(4.727.735.255)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 11	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 12	0	0
Pendapatan PNBPN		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(5.036.808.493)	(4.727.735.25)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	5.556.327.383	5.742.250.337
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.036.808.493)	(4.727.735.255)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5.198.076.496	4.541.812.301
Ekuitas Akhir		5.717.595.386	5.556.327.383

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2021 tentang entang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
- x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pamekasan

Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2015-2022 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2022.

Visi Pengadilan Agama Pamekasan adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

Misi Pengadilan Agama Pamekasan adalah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pamekasan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
- d. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
- e. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- f. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- g. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
- h. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- i. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- j. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- k. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
- l. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
- m. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- n. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

- o. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
- p. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
- q. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
- r. Terwujudnya ketertiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
- s. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
- t. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.
- u. Terwujudnya Peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang		
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang

disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Pamekasan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal berupa pergeseran atau revisi POK. Hal ini dilaksanakan untuk menertibkan administrasi seperti menambah akun, menambah detail, rencana penarikan dana. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Di bulan Mei untuk belanja barang dan modal ada penambahan anggaran dari BUN. Belanja barang berupa langganan internet, sedangkan belanja modal berupa tambahan pengadaan laptop untuk hakim. Penambahan anggaran tersebut adalah program dari Mahkamah Agung untuk mendukung program E-Court. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	180.000	180.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	180.000	180.000
Belanja	0	0
Belanja Pegawai	3.092.650.000	3.297.450.000
Belanja Barang	1.542.352.000	1.573.563.000
Belanja Modal	23.500.000	23.500.000
Jumlah Belanja	4.658.502.000	4.894.513.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara :
Rp 0*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Kode	Uraian	2022		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-		
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		-	
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		-	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	180.000,00	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		180.000,00	-	0,00
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		180.000,00	-	0,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2022 ada perubahan sebesar Rp. 0 dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2021.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	360.000,00	(360.000,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Netto		-	360.000,00	(360.000,00)	(100,00)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
4.808.211.
746

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.808.211.746 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,00% dari anggaran senilai Rp. 4.894.513.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.297.450.000	3.228.287.868	98,00
Belanja Barang	1.573.563.000	1.556.423.878	99,00
Belanja Modal	23.500.000	23.500.000	99,89
Total Belanja Bruto	4.894.513.000	4.808.211.746	98,00
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	4.894.513.000	4.808.211.746	98,00

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 266.396.654 atau sebesar 5,87 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

Tercapainya Belanja Negara sesuai rencana dan terserapnya anggaran tersebut 98,00%

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.228.287.868	3.160.808.305	67.479.563	2,13%
Belanja Barang	1.556.423.878	1.343.506.787	212.917.091	15,85%
Belanja Modal	23.500.000	37.500.000	-14.000.000	-37,33%
Total Belanja	4.808.211.746	4.541.815.092	266.396.654	5,87%

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp
3.228.287.
868

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 3.228.287.868 dan Rp. 3.160.808.305

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 5,87 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Jumlah Pegawai yang bertambah karena mutasi sehingga mempengaruhi terhadap realisasi belanja pegawai

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.292.513.100	1.243.405.980	49.107.120	3,95%
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.670	16.141	1.529	9,47%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	102.976.634	101.963.692	1.012.942	0,99%
Beban Tunj. Anak PNS	35.817.894	31.845.228	3.972.666	12,47%
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0	0,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.300.675.000	1.284.490.000	16.185.000	1,26%
Beban Tunj. PPh PNS	151.397.364	173.961.248	-22.563.884	-12,97%
Beban Tunj. Beras PNS	77.127.300	68.292.060	8.835.240	12,94%
Beban Uang Makan PNS	211.208.000	205.584.000	5.624.000	2,74%
Beban Tunjangan Umum PNS	20.340.000	14.850.000	5.490.000	36,97%
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00%
Total Belanja Brutto	3.228.472.962	3.160.808.349	67.664.613	2,14%
Pengembalian Belanja	185.094	44	185.050	420568,18%
Total Belanja Netto	3.228.287.868	3.160.808.305	67.479.563	2,13%

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp1.556.4
23.878

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.556.423.878 dan Rp. 1.343.506.787.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,30 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Cepat terserapnya belanja barang pada tahun 2022 sehingga mengalami kenaikan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022 Realisasi	TA 2021 Realisasi	Perubahan Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.008.723.450	877.665.197	131.058.253	14,93%
Belanja Barang Non Operasional	4.050.000	650.000	3.400.000	523,08%
Belanja Jasa	132.427.428	119.488.155	12.939.273	10,83%
Belanja Pemeliharaan	364.573.000	298.120.435	66.452.565	22,29%
Belanja Perjalanan Dinas	46.650.000	47.583.000	-933.000	-1,96%
Total Belanja Brutto	1.556.423.878	1.343.506.787	212.917.091	15,85%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Total Belanja Netto	1.556.423.878	1.343.506.787	212.917.091	15,85%

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp23.500.
000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 23.500.000 dan Rp. 37.500.000

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar (50,60) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja modal tahun lalu lebih besar dari tahun sekarang.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	23.500.000	37.500.000	-14.000.000	-37,33%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Total Belanja Brutto	23.500.000	37.500.000	-14.000.000	-37,33%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	23.500.000	37.500.000	-14.000.000	-37,33%

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
103.800

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.103.800 dan Rp. 510.450.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Persediaan	103.800	510.450
Total Aset Lancar	103.800	510.450

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka
(prepaid): Rp 0

Belanja dibayar dimuka (prepaid) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 merupakan arus kas keluar atau pengeluaran perusahaan yang telah dapat ditentukan penggunaannya karena telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen2 yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi,invoice dll namun perusahaan belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Belanja dibayar Dimuka (prepaid)

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2022	31 Desember TA 2021
1.	Belanja dibayar Dimuka (Prepaid)	0	0
	Jumlah	0	0

C.2.1 Persediaan

*Persediaan: Rp.
103.800*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 103.800 dan Rp. 510.450. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	103.800	510.450
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	103.800	510.450

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.5.737.478.700*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp.5.737.478.700 dan Rp.5.574.078.676 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Rincian Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	2.447.769.000	2.447.769.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.270.643.734	1.857.278.984	413.364.750
3	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000	3.595.930.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5.704.857	5.704.857	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	8.320.047.591	7.906.682.841	413.364.750
	Akumulasi Penyusutan	-2.582.568.891	-2.332.604.165	-249.964.726
	Nilai Buku Aset Tetap	5.737.478.700	5.574.078.676	163.400.024

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp2.447.769.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.447.769.000 dan Rp. 2.447.769.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	2.447.769.000
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2022	2.447.769.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	2.447.769.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1.	515	Jl. Raya kabupaten Pamekasan	927,881,000
2.	2.194	Jl. Raya Tlanakan Pamekasan	1,519,888,000
Jumlah			2.447.769.000

Tidak ada Mutasi Tanah pada tahun 2022

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.270.643.734*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.270.643.734 dan Rp. 1.857.278.984.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	1.857.278.984
Mutasi Tambah	413.364.750
	413.364.750
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2022	2.270.643.734
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-1.861.006.993
Nilai Buku 31 Desember 2022	409.636.741

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 413.364.750,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 413.364.750,-.

Penambahan sebesar Rp 413.364.750,- merupakan Belanja Modal dan tranfer masuk Tahun 2022

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
3.595.930.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.595.930.000 dan Rp. 3.595.930.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	3.595.930.000
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2022	3.595.930.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-721.561.898
Nilai Buku 31 Desember 2022	2.874.368.102

Tidak terdapat Mutasi Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
5.704.857*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.704.857 dan Rp. 5.704.857

Tidak ada mutasi tambah aset tetap lainnya pada Tahun 2022

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	5.704.857
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2022	5.704.857
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	5.704.857

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (2.582.568.891)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(2.582.568.891) dan Rp(2.332.604.165)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.270.643.734	-1.861.006.993	409.636.741
2	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000	-721.561.898	2.874.368.102
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.704.857	0	5.704.857
	Jumlah	5.872.278.591	-2.582.568.891	3.289.709.700

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya : Rp.0

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp.0 dan Rp.0 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3.1. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp
(22.200.000)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(22.200.000) dan Rp.(22.200.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Aset tak Berwujud	22.200.000	22.200.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	22.200.000	22.200.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(22.200.000)	(22.200.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.19.987.114*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.19.987.114 dan Rp.18.261.743 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp. 19.987.114

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Pamekasan per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	19.987.114	18.261.743
Jumlah	19.987.114	18.261.743

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp.19.987.114

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.987.114 dan Rp.18.261.743 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Pamekasan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada Pihak ketiga	19.987.114	Pembayaran Rekening Telepon, air dan Uang Makan PNS Bulan Desember 2022
	Jumlah	19.987.114	

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN:
Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Cadangan Piutang:
Rp
5.717.595.386

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.717.595.386 dan Rp. 5.556.327.383 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat Penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. -1.725.371 atau (9,45%) dari nilai per 31 Desember TA 2021. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 19.987.114, sedangkan per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp. 18.261.743

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp 360.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan	0	-	0
	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		360.000	(360.000)
				(100,00)
	Total Pendapatan	0	360.000	360.000
				100,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp
3.236.568.868

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar 3.236.568.868 dan 3.157.199.305. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	1.292.530.676	1.243.405.980	49.124.696
				3,95%
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	1.724.549.192	1.711.816.304	12.732.888
				0,74%
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	219.489.000	201.852.000	17.637.000
				8,74%
4.	Beban Lembur	0	0	0
				0
	Total	3.236.568.868	3.157.074.284	79.494.584
				2,52%

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.38.379.850*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.38.379.850 dan Rp.44.420.650. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	38.379.850	44.420.650	(6.040.800) 13,60
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0 0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0 0
		38.379.850	44.420.650	(6.040.800) 13,60

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
1.092.640.549*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.092.640.549 dan Rp. 941.959.204. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Langganan Daya dan Jasa	125.871.799	121.474.007	4.397.792 3,62%
Beban Jasa Pos dan Giro	960.000	3.597.500	-2.637.500 -73,31%
Beban Jasa Konsultan	0	0	0 0
Beban Jasa Profesi	0	0	0 0
Beban Jasa Lainnya	965.808.750	816.887.697	148.921.053 18,23%
Total Beban Jasa	1.092.640.549	941.959.204	150.681.345 16,00%

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.372.604.500*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.372.604.500 dan Rp.311.101.335. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%	
Beban Langganan Daya dan Jasa	121.474.257	131.891.253	-10.416.996	-7,90%
Beban Jasa Pos dan Giro	3.597.500	3.600.000	-2.500	-0,07%
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	816.887.697	769.491.460	47.396.237	6,16%
Total Beban Jasa	1.092.640.549	941.959.204	36.976.491	4,08%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
: Rp.46.650.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.650.000 dan Rp. 47.583.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%	
Beban Perjalanan Biasa	46.350.000	46.683.000	-333.000	-0,71%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	300.000	900.000	-600.000	-66,67%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	46.650.000	47.583.000	-933.000	-1,96%

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
249.964.726

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 249.964.726 dan Rp.246.704.760. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.828.313	94.181.348	24.009.965 10,626
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	131.136.413	131.136.413	0 (0,00)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan	249.964.726	225.954.761	24.009.965 10,626
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	249.964.726	225.954.761	24.009.965 10,626

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain

per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.556.327.383 dan Rp.5.742.250.337

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(5.036.808.493) dan Rp.(4.727.735.255) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal Penilaian ulang tanah dan bangunan.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari Selisih Revaluasi aset tetap.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.198.076.496 dan Rp. 4.541.812.301 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.808.211.746
Transfer Masuk	357.209
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5.198.076.496

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.4.808.211.746

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp. 389.864.750-. dari total yang diterima sepanjang tahun 2022.

Dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp. 0-. dari total yang dikeluarkan sepanjang tahun 2022.

Rincian Transfer Masuk untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Barang	Bentuk	Nilai
1.	Biro Umum Mahkamah Agung R.I.	Alat Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	205.504.750
2.	Biro Umum Mahkamah Agung R.I.	Lap Top	59.960.000
3.	Biro Umum Mahkamah Agung R.I.	Alat Pengolah Data	124.400.000
Jumlah			389.864.750

Rincian Penerimaan Transfer Masuk disajikan pada lampiran

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.717.595.386 dan Rp.5.556.327.383

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

1. Terdapat pembayaran rekening Telepon yang seharusnya dibayarkan di bulan Desember 2022 sebesar Rp.144.012 namun ditangguhkan sampai Januari tahun 2023.
2. Terdapat pembayaran rekening Air yang seharusnya dibayarkan di bulan Desember 2022 sebesar Rp.300.000 namun ditangguhkan sampai Januari tahun 2023.
3. Terdapat pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2022 yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 19.542.000 namun ditangguhkan sampai Januari tahun 2023.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Pamekasan adalah:

1. BRI Cabang Pamekasan A/C 65324401539100 a.n. BPG 036 KANTOR PA PAMEKASAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Rekening Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Pamekasan Kode Anggaran 005.01

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. DIPA AWAL

Dipa Awal Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.658.502.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.658.502.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.635.002.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.635.002.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.630.002.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.092.650.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.092.650.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.226.152.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		20.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		122.617.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		30.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.203.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		221.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		61.801.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		174.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		15.400.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.537.352.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		786.452.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		716.202.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		14.500.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		55.750.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		252.860.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		174.000.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3.600.000
522111	Belanja Langganan Listrik		64.560.000
522112	Belanja Langganan Telepon		3.600.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		3.500.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		331.350.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		174.580.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.770.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.750.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.750.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		40.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		34.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.300.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		7.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.200.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		2.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		47.520.000
522141	Belanja Sewa		47.520.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

2. Revisi 1 DIPA tanggal 28 Mei 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.658.502.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.658.502.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.635.002.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.635.002.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.630.002.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.092.650.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.092.650.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.226.152.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		20.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		122.617.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		30.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.203.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		221.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		61.801.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		174.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		15.400.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.537.352.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		786.452.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		716.202.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		14.500.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		55.750.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		252.862.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		174.000.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3.600.000
522111	Belanja Langganan Listrik		64.560.000
522112	Belanja Langganan Telepon		3.600.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		3.502.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		331.350.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		174.580.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.770.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.750.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.750.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		40.698.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40.308.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		390.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		7.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		2.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		47.520.000
522141	Belanja Sewa		47.520.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

3. Revisi 2 DIPA tanggal 11 Juli 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA dan POK sehingga terjadi pergeseran Anggaran DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.677.297.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.677.297.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.653.797.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.653.797.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.648.797.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.092.650.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.092.650.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.226.152.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		20.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		122.617.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		30.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.203.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		221.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		61.801.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		174.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		15.400.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.556.147.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		805.247.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		734.997.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		14.500.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		55.750.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		252.862.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		174.000.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3.600.000
522111	Belanja Langganan Listrik		64.560.000
522112	Belanja Langganan Telepon		3.600.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		3.502.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		331.350.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		174.580.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.770.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN		9.750.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.750.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		40.698.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40.308.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		390.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		7.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		2.000.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.000.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		47.520.000
522141	Belanja Sewa		47.520.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

4. Revisi 3 DIPA tanggal 11 Oktober 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA dan POK sehingga terjadi pergeseran Anggaran DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.883.087.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.883.087.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.859.587.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.859.587.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel		4.100.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		900.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.854.587.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.297.450.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.297.450.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.284.052.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		30.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		102.317.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		35.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.340.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		158.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		76.491.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		242.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		20.900.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.557.137.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		805.247.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		734.997.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		14.500.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		55.750.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		252.862.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		174.000.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3.600.000
522111	Belanja Langganan Listrik		64.560.000
522112	Belanja Langganan Telepon		3.600.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		3.502.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		331.350.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		174.580.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.770.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.750.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.750.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		40.698.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40.308.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		390.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		7.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		6.800.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		200.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		48.510.000
522141	Belanja Sewa		48.510.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
			23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

6. Revisi 4 DIPA tanggal 9 November 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA dan POK dan tidak menyebabkan terjadinya pergeseran Anggaran DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.883.087.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.883.087.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.859.587.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.859.587.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel		4.100.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		900.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.854.587.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.297.450.000
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>		3.297.450.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.284.052.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		30.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		102.317.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		35.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.340.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		158.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		76.491.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		242.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		20.900.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.557.137.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		793.486.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		732.477.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		15.007.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		46.002.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		239.850.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		156.010.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		960.000
522111	Belanja Langganan Listrik		76.092.000
522112	Belanja Langganan Telepon		708.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		2.480.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		356.486.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		199.880.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.606.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.180.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.180.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		46.905.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.605.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		300.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		6.800.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		200.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		48.510.000
522141	Belanja Sewa		48.510.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		23.500.000
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

7. Revisi 5 DIPA tanggal 29 November 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA dan POK sehingga terjadi pergeseran Anggaran DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.894.513.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.894.513.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.871.013.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.871.013.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel		4.100.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		900.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.866.013.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.297.450.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.297.450.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.284.052.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		30.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		102.317.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		35.792.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.340.790.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		158.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		76.491.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		242.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		20.900.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.568.563.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		793.490.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		732.477.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		15.007.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		46.006.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		239.852.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		156.010.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		960.000
522111	Belanja Langganan Listrik		76.094.000
522112	Belanja Langganan Telepon		708.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		2.480.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		367.906.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		211.300.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.606.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.180.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.180.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		46.905.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.605.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		300.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		6.800.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		200.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		48.510.000
522141	Belanja Sewa		48.510.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		23.500.000
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

8. Revisi 6 DIPA (DJA) tanggal 27 Desember 2022 tentang Revisi Lembar ke III DIPA dan POK dan tidak terjadi pergeseran Anggaran DIPA tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Jumlah
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN		4.894.513.000
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		4.894.513.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		4.871.013.000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.871.013.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		
1066.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
51	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		5.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		5.000.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel		4.100.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		900.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.866.013.000
1	Gaji dan Tunjangan		3.297.450.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		3.297.450.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.292.552.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		30.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		102.977.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		35.819.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		36.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.330.963.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		158.438.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		77.131.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		242.240.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		20.900.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.568.563.000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		781.094.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		720.081.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		15.007.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		46.006.000
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		239.900.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		156.010.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		960.000
522111	Belanja Langganan Listrik		76.142.000
522112	Belanja Langganan Telepon		708.000
522113	Belanja Langganan Air		3.600.000
522141	Belanja Sewa		2.480.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR		380.266.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		223.660.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		156.606.000
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		49.200.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		37.200.000
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN		9.180.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		9.180.000
F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA		46.905.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.605.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		300.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL		5.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		5.520.000
H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL		1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.000.000
I	PENANGGULANGAN COVID 19		6.988.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		6.800.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		188.000
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim		48.510.000
522141	Belanja Sewa		48.510.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		23.500.000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit	23.500.000
	[Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR		23.500.000
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3 Unit	23.500.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		23.500.000
A	Pengadaan Alat Pengolah Data		23.500.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.500.000

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Semester Tahun 2022 ini Pengadilan Agama Pamekasan terdapat Ralat/Koreksi SPM berupa :

1. Ralat/Koreksi SPM no 119 tanggal 21 September 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan September untuk 9 Pegawai.
2. Ralat/Koreksi SPM no 118 tanggal 21 September 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan September untuk 6 Pegawai.
3. Ralat/Koreksi SPM no 108 tanggal 6 September 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan September untuk 1 Pegawai.
4. Ralat/Koreksi SPM no 104 tanggal 26 Agustus 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan Agustus untuk 9 Pegawai.
5. Ralat/Koreksi SPM no 92 tanggal 22 Juli 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan Juli untuk 9 Pegawai.
6. Ralat/Koreksi SPM no 80 tanggal 20 Juni 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan Juni untuk 10 Pegawai.
7. Ralat/Koreksi SPM no 63 tanggal 23 Mei 2022 untuk Pembayaran Honor PPNP Bulan Mei untuk 10 Pegawai.
8. Ralat/Koreksi SPM no 41 tanggal 18 April 2022 untuk Pembayaran THR Keagamaan untuk 4 Pegawai.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang harus diungkapkan dalam Laporan keuangan ini

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Pamekasan
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Saldo Awal	Beban Penyusutan	TOTAL	Nilai Buku
					2022	9=6+7+8	10=5-9
A.	Peralatan dan Mesin	455	2.270.643.734	(1.742.178.680)	(118.828.313)	(1.861.006.993)	409.636.741
1.	Alat Bantu	1	121.000	(121.000)	0	(121.000)	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	439.009.417	(439.009.417)	0	(439.009.417)	0
3.	Alat Kantor	53	51.201.000	(51.201.000)	0	(51.201.000)	0
4.	Alat Rumah Tangga	267	471.886.767	(427.623.853)	(4.760.456)	(432.384.309)	39.502.458
5.	Alat Studio	11	89.060.420	(30.310.600)	(7.395.382)	(37.705.982)	51.354.436
6.	Alat Komunikasi	2	673.000	(673.000)	0	(673.000)	0
7.	Komputer Unit	71	878.696.810	(619.903.250)	(66.902.465)	(686.805.715)	191.891.095
8.	Peralatan Komputer	41	339.995.320	(173.336.560)	(39.770.010)	(213.106.570)	126.888.750
B.	Gedung dan Bangunan		3.595.930.000	(590.425.485)	(131.136.413)	(721.561.898)	2.874.368.102
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	3.595.930.000	(590.425.485)	(131.136.413)	(721.561.898)	2.874.368.102
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0	0	0

E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0
2.	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
3.	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
4.	Unit Alat Laboratorium	8	0	0	0	0	0
5.	Peralatan Komputer	4	0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		5.866.573.734	(2.332.604.165)	(249.964.726)	(2.582.568.891)	3.284.004.843
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		5.866.573.734	(2.332.604.165)	(249.964.726)	(2.582.568.891)	3.284.004.843

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Pamekasan
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL						
	Jumlah :						

